

PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR BERBASIS EKONOMI HUJAU DI KEPULAUAN MALUKU

Agustinus Kastanya

Guru Besar Perencanaan dan Ekonomi Sumber Daya Hutan
Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Program Pasca Sarjana - Universitas Pattimura Ambon.

Paper disampaikan pada Kongres Kehutanan Indonesia ke VI

JAKARTA , GRAND SAHID JAYA 29 NOPEMBER - 02 DESEMBER 2016

FOKUS BAHASAN

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL
DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**
- 3. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP
PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR**
- 4. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN
KEPULAUAN MALUKU**
- 5. KESIMPILAN DAN REKOMENDASI**

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, Dengan populasi penduduk lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, dengan peringkat penduduk keempat terbesar di Dunia.
2. Sistem ekonomi yang dikembangkan bersifat eksploitatif terutama untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan faktor ekologi dan sosial budaya masyarakat.

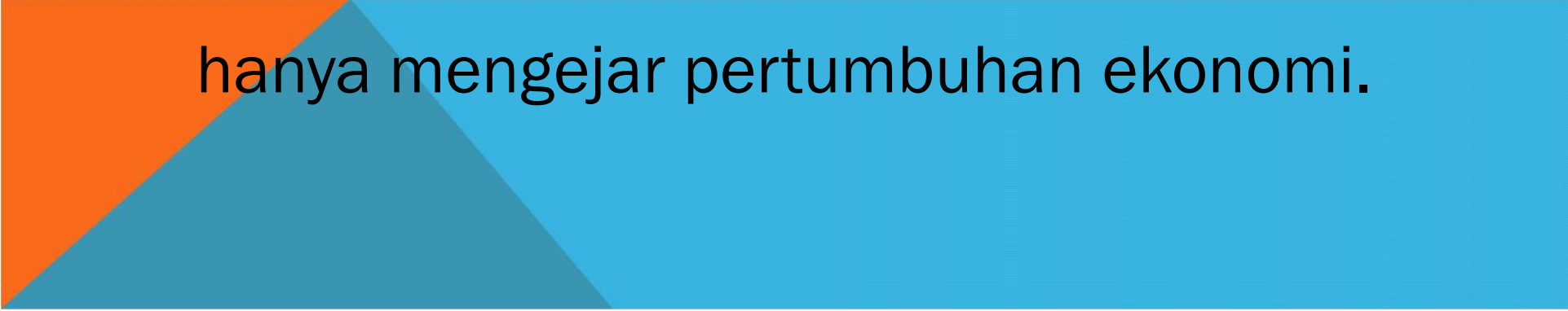
Deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan, terjadi penurunan sumber daya alam, krisis ekologi dan keragaman hayati menyebabkan terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, terjadi kesenjangan sosial, kelompok kaya dan miskin, yang berdampak secara luas yaitu terjadi pemanasan dan perubahan iklim global.

3. Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 dan selanjutnya 20 tahun berikutnya pada 2012 (Rio+20) menyepakati pembangunan berkelanjutan sebagai arahan untuk mewujudkan kehidupan di masa mendatang yang lebih sejahtera, nyaman, serta berkeadilan.
4. Pendekatan Pembangunan yang mengedepankan kelestarian bentang alam atau lanskap hutan menjadi arahan pembangunan dimasa mendatang (Maryani, dkk. 2014; Kastanya, 2014).



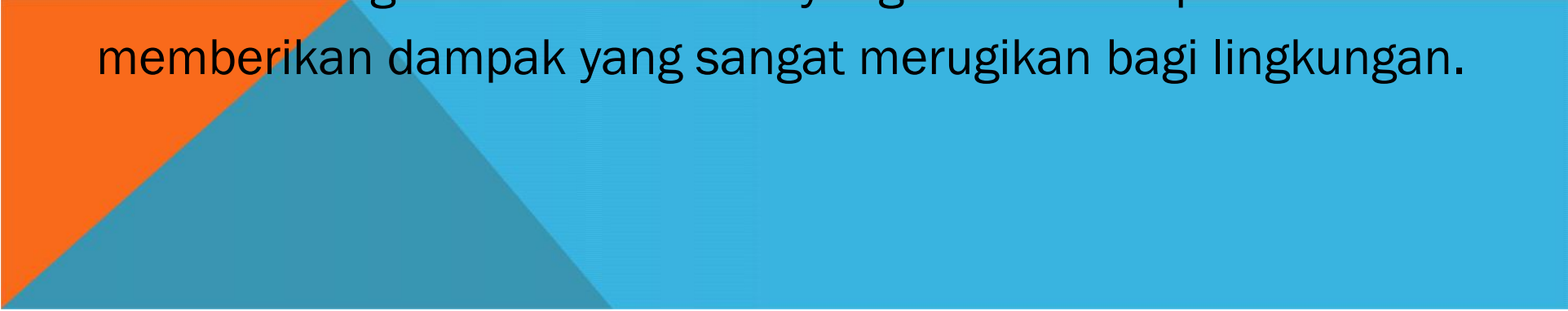
5. Indonesia dengan tingkat keragaman yang tinggi secara ekologi, sosial budaya dan tingkat perkembangan ekonomi membentuk ekoregion yang berbeda-beda. Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000, menetapkan ekoregion, Indonesia terdiri dari Ekoregion Sumatera, Ekoregion Kalimantan, Ekoregion Jawa, Ekoregion Sulawesi, Ekoregion Papua, Ekoregion Maluku, Ekoregion Bali Nusa tenggara
6. Ekorigion Maluku yang adalah wilayah pulau-pulau kecil dengan beberapa wilayah terluar, memiliki karakteristik yang spesifik, namun kebijakan pembangunan yang berlangsung sampai saat ini masih berlangsung secara sentralistik yang kurang memperhatikan karakteristik wilayah pulau-pulau kecil, sehingga kebijakan nasional walaupun tidak sesuai dengan karakteristik ekorigion tetap dipaksakan untuk dilaksanakan.

Ekoregion Maluku meliputi Maluku dan Maluku Utara dengan kondisi ekologi ekonomi dan social budaya yang sangat berbeda dengan daerah lain, tidak mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, yang dikelola secara sentralistik dengan sistem ekonomi bersifat eksploitatif dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.



II. KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Ekoregion Maluku yang ditetapkan sebagai salah satu dari 7 ekoregion Indonesia, memiliki jumlah pulau lebih dari 2000 buah pulau, sifat dan karakternya sangat berbeda dengan ekoregion lainnya dan harus menjadi perhatian dalam proses pengelolaannya. Perlu diperhatikan bahwa penetapan ekoregion baru saja ditetapkan pada tahun 2013, dan proses pembangunan yang berlangsung selama ini masih bersifat sentralistik dan sektoral dengan sistem ekonomi yang bersifat eksploitatif telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan.



PETA SEBARAN WILAYAH EKO-REGION PROV. MALUKU DAN PROV. MALUKU UTARA

KETERANGAN :

- Jalan
- Sungai
- Batas Wilayah

KETERANGAN EKO-REGION :

- F** Cagar Budaya
- M** Daerah Perikanan
- B22** Daerah Perikanan Kompleks
- V31** Daerah Perikanan Kompleks
- K3** Daerah Perikanan Kompleks
- B2** Kawasan Perikanan Kompleks
- B21** Kawasan Perikanan Kompleks
- B22** Kawasan Perikanan Kompleks
- V31** Kawasan Perikanan Kompleks
- V32** Kawasan Perikanan Kompleks
- K2** Kawasan Perikanan Kompleks
- B1** Kawasan Perikanan Kompleks
- B11** Kawasan Perikanan Kompleks
- B12** Kawasan Perikanan Kompleks
- V11** Kawasan Perikanan Kompleks

PROVINSI MALUKU

No	Kode	Nama	Ekoregion
1	001	001-001	001-001
2	002	002-002	002-002
3	003	003-003	003-003
4	004	004-004	004-004
5	005	005-005	005-005
6	006	006-006	006-006
7	007	007-007	007-007
8	008	008-008	008-008
9	009	009-009	009-009
10	010	010-010	010-010
11	011	011-011	011-011
12	012	012-012	012-012

EKOREGION MALUKU UTARA

No	Kode	Nama	Ekoregion
1	001	001-001	001-001
2	002	002-002	002-002
3	003	003-003	003-003
4	004	004-004	004-004
5	005	005-005	005-005
6	006	006-006	006-006
7	007	007-007	007-007
8	008	008-008	008-008
9	009	009-009	009-009
10	010	010-010	010-010
11	011	011-011	011-011
12	012	012-012	012-012

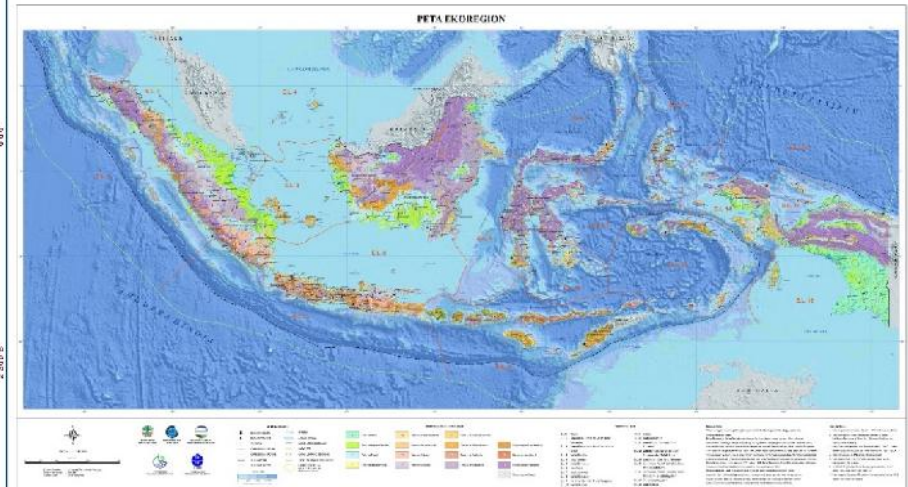
Skala 1:200.000

Legenda:

- Jalan
- Sungai
- Batas Wilayah

Inset Map:

Indonesia

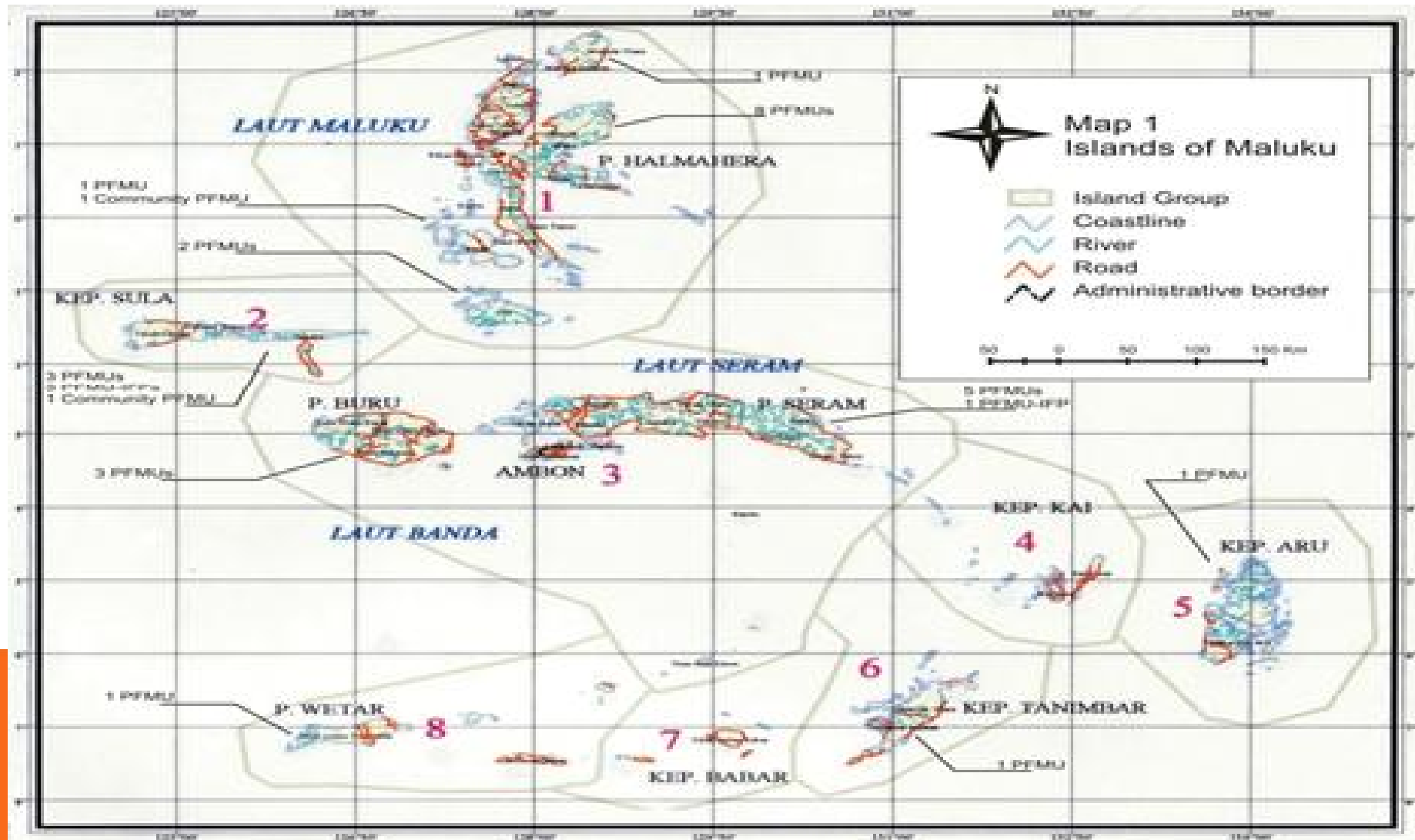


Ekoregion Maluku meliputi Maluku dan Maluku Utara → Hubungannya dengan Gugus pulau/wilayah pengembangan di Maluku – Maluku Utara.

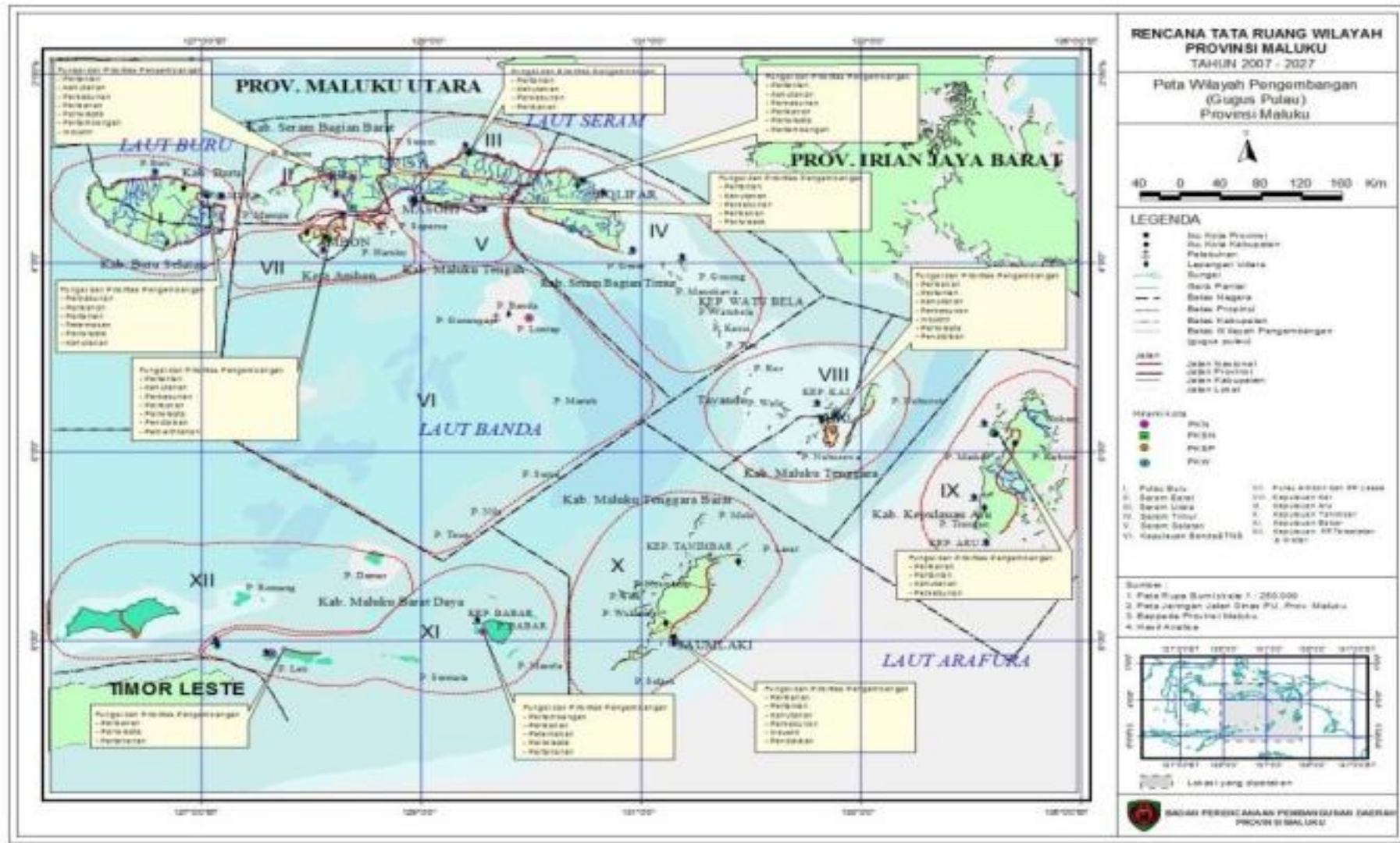
II. KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN....

Kepulauan Maluku sebelum dimekarkan pada tahun 2001 telah mengembangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan pendekatan gugus Pulau dan Laut Pulau, yang terdiri dari 8 gugus pulau. Selanjutnya setelah dimekarkan menjadi 2 provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara meliputi gugus 1 dan 2 dan Provinsi Maluku meliputi gugus 3 - 8. Provinsi Maluku Utara selanjutnya mengembangkan RTRWP dari 2 gugus pulau menjadi 8 Wilayah Pengembangan/gugus pulau dan Provinsi Maluku dari 6 gugus pulau menjadi 12 gugus pulau.

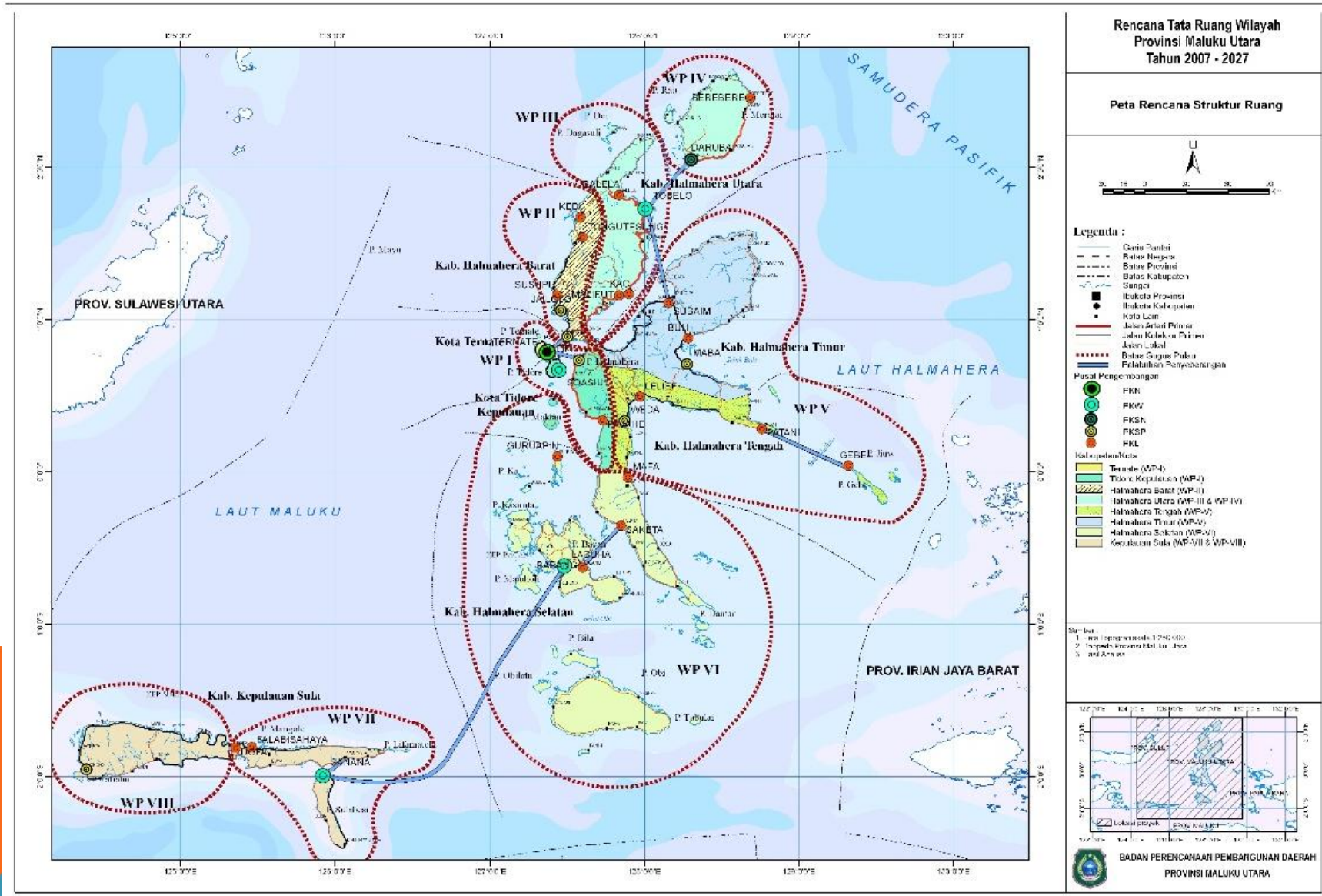
8 GUGUS PULAU KEP. MALUKU



12 GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU (SESUDAH PEMEKARAN)

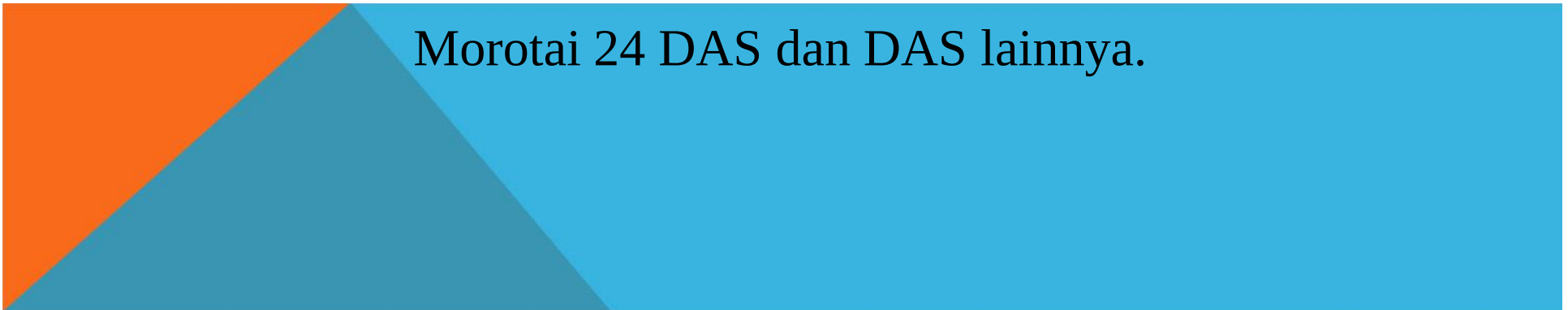


8 WILAYAH PENGEMBANGAN / GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU UTARA (SESUDAH PEMEKARAN)

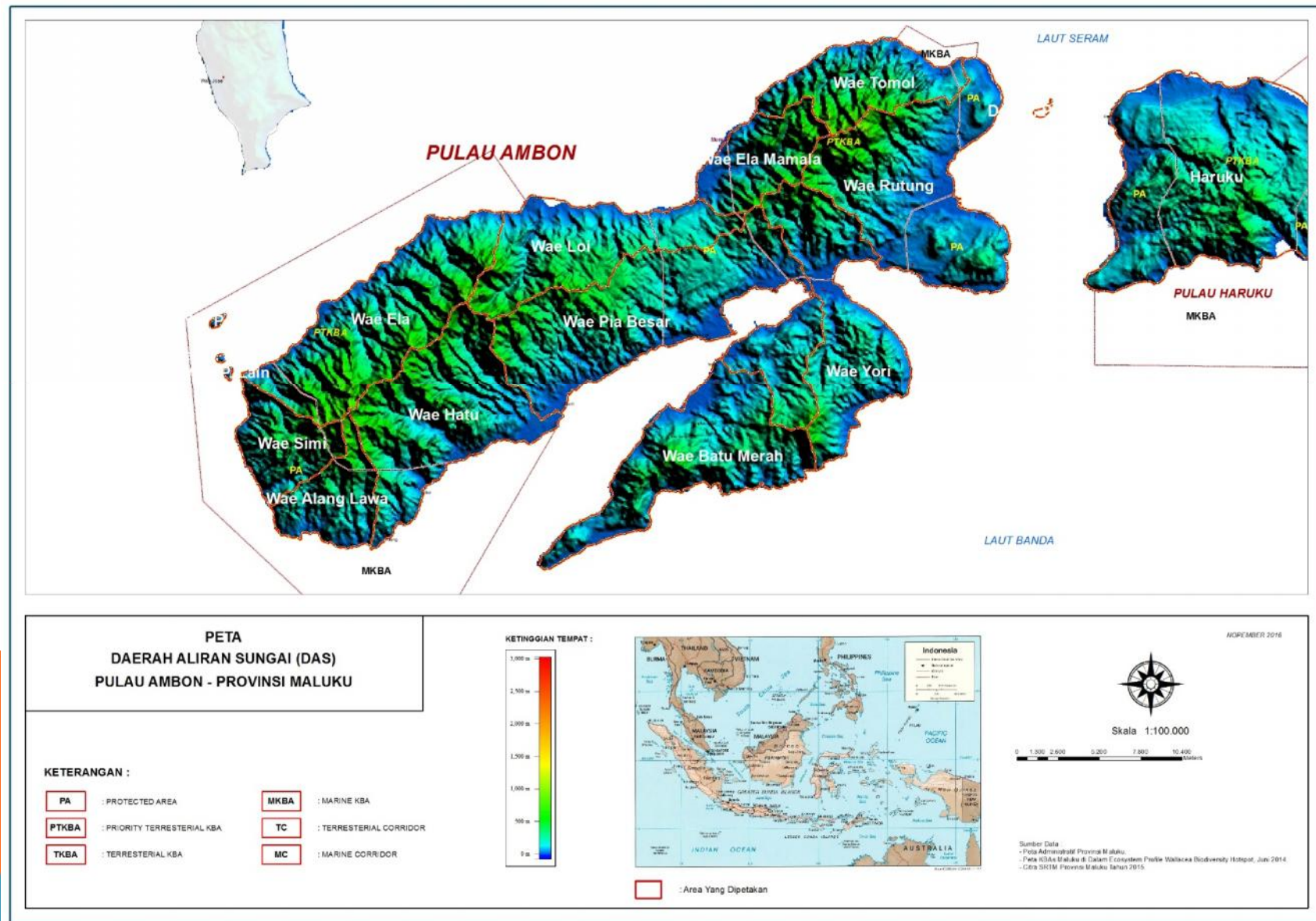


II. KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN....

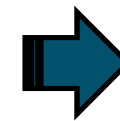
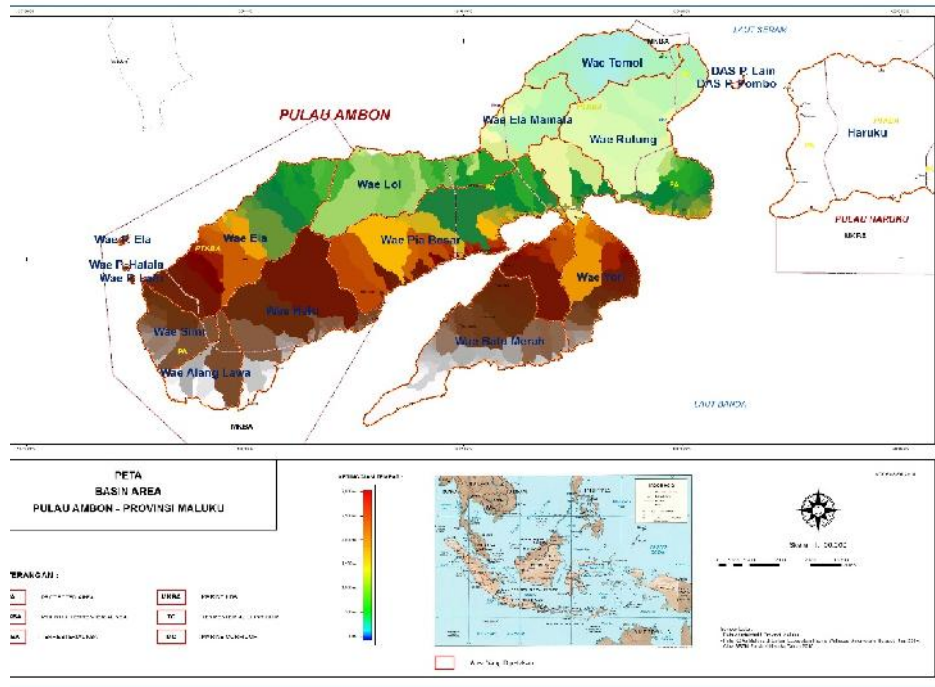
Karakter dan sifat yang sangat spesifik pada pulau-pulau kecil seperti di Kepulauan Maluku adalah DAS yang sempit dan pendek terutama pada pulau-pulau yang sangat kecil. Pulau-Pulau dalam ukuran sedang juga memiliki DAS yang sempit dan pendek seperti pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Ambon, Pulau Yamdena, Pulau Wetaar, Pulau Halmahera, Pulau Morotai. Sebagai contoh pada Pulau Buru (Gugus Pulau 1), memiliki 30 DAS, Pulau Ambon 11 DAS, Pulau Morotai 24 DAS dan DAS lainnya.



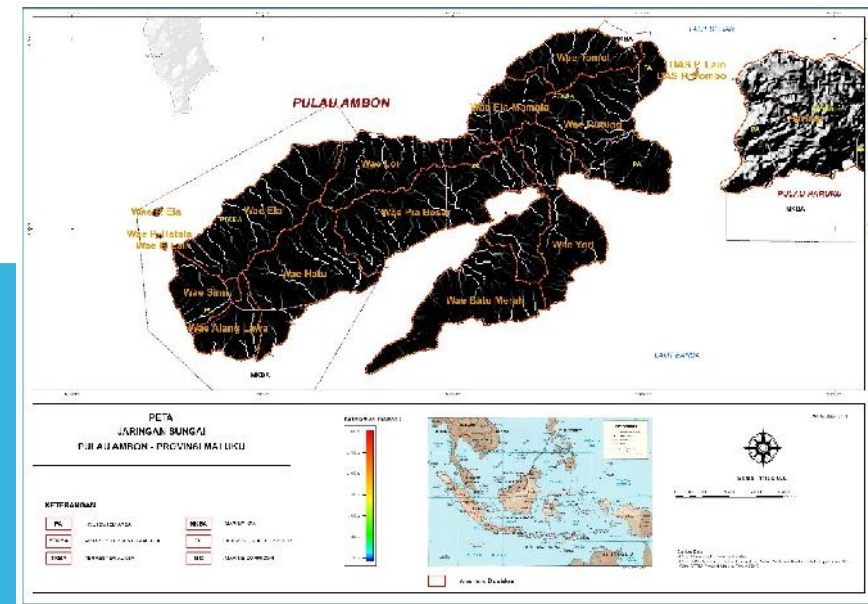
CONTOH DAS PULAU AMBON YANG TERDAPAT PADA GUGUS PULAU VII



CONTOH DAS PULAU AMBON YANG TERDAPAT PADA GUGUS PULAU VII



Peta Basin Area
Pulau Ambon

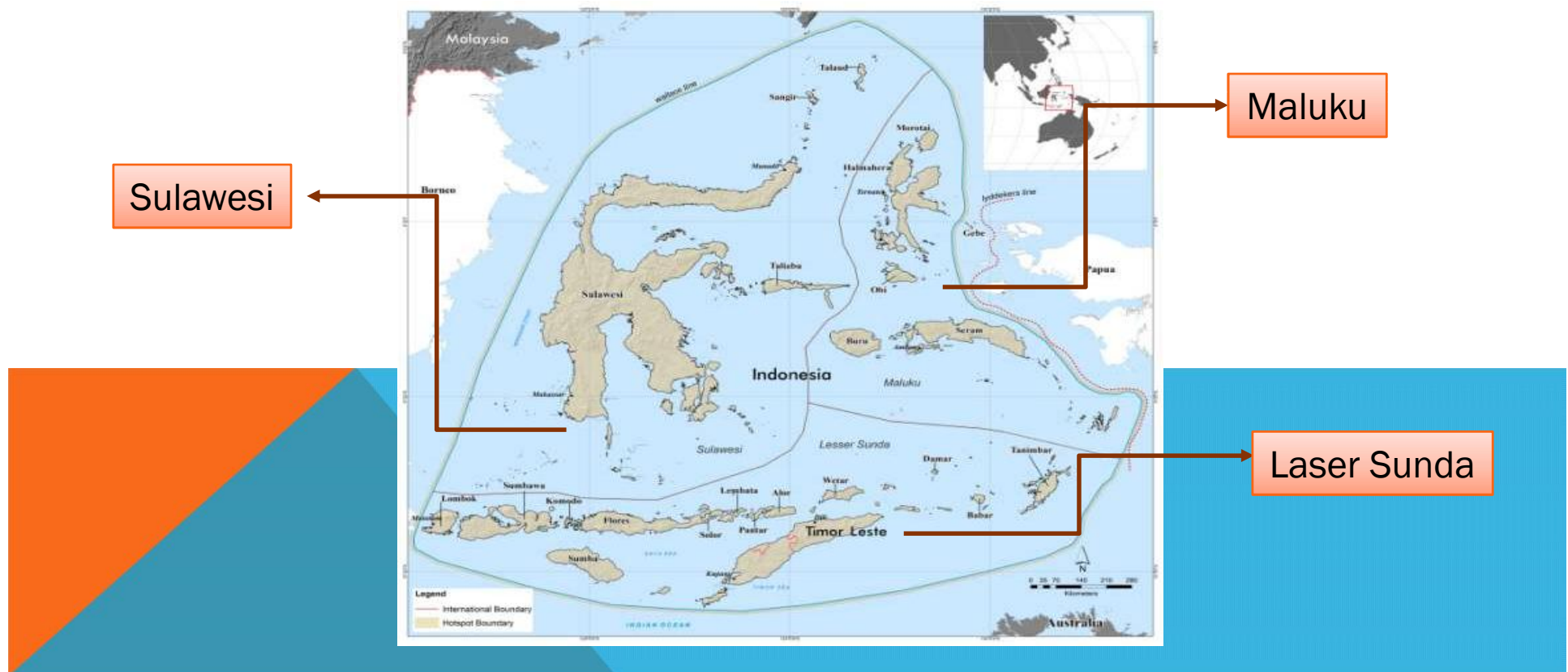


Peta Jar. Sungai
Pulau Ambon

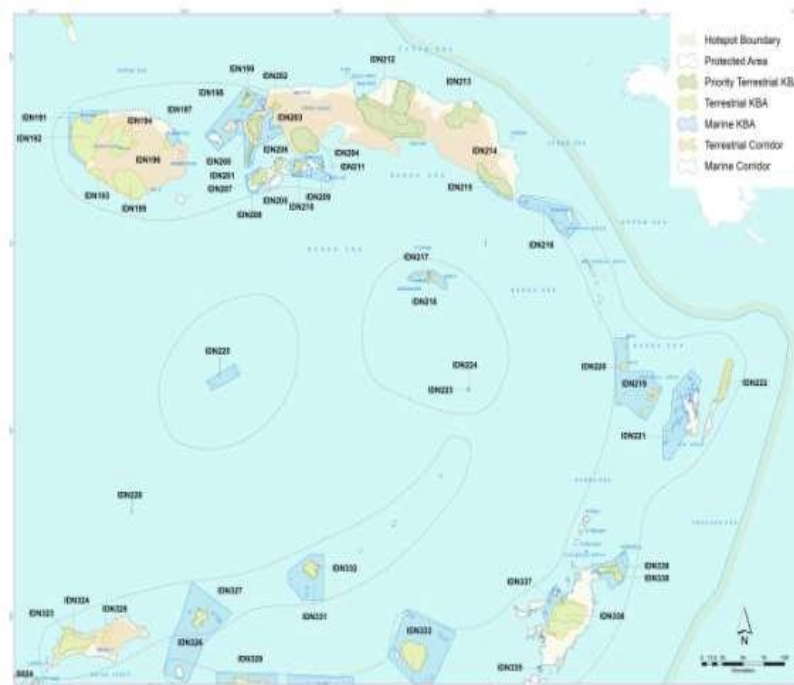


WILAYAH WALLACEA KEPULAUAN MALUKU

Kepulauan Maluku memiliki Biodiversitas yang tinggi terutama endemis, merupakan bagian dari wilayah Wallacea, seperti pada Gambar 4a, diperkirakan luas total lahan wilayah Wallacea sekitar 33.8 juta Ha, yang terbagi atas 3 subregion biodiversity yaitu Maluku, Lesser Sunda dan Pulau Sulawesi (Coates and Bishop 1997).



PETA WILAYAH WALLACEA DI KEP. MALUKU.....



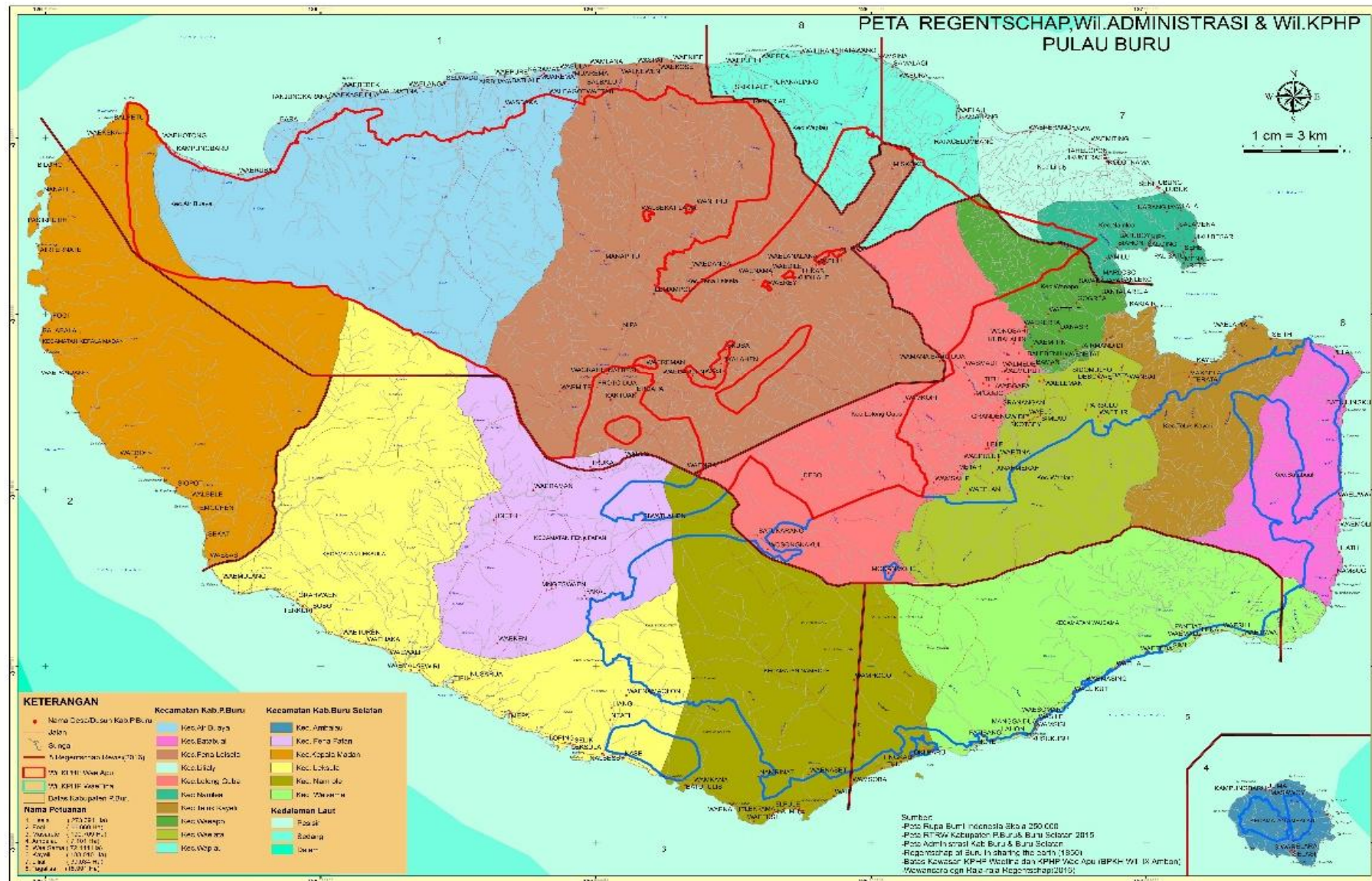
**Peta Wilayah Wallacea
Prov. Maluku**



**Peta Wilayah Wallacea
Prov. Maluku Utara**



KARAKTERISTIK SOSIAL BUDAYA : PETA WILAYAH ADAT DAN KPH DI PULAU BURU

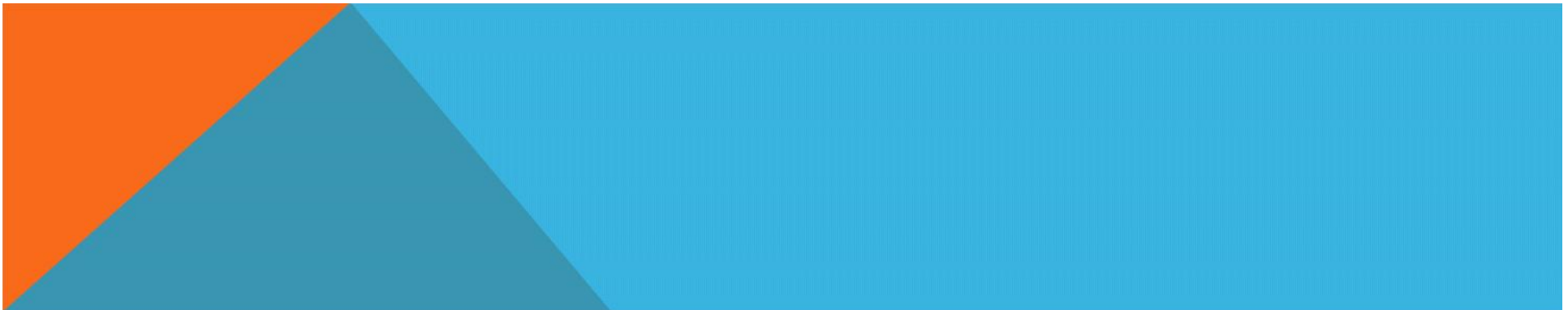


9 PERMASALAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI MALUKU DAN MALUKU UTARA

1. **Pembangunan TANPA dasar** : konsep tata ruang dan tataguna lahan dengan mempertimbangkan kondisi ekologi kepulauan.
2. Konsep tata ruang dan tata guna hutan kesepakatan dirumuskan kemudian setelah terjadi **tumpang tindih pemanfaatan lahan** → konflik di masyarakat, terjadi degradasi lahan, deforestasi pesat yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara luas.
3. Pengelolaannya belum melibatkan **partisipasi masyarakat** secara luas : masyarakat di sekitar hutan, masyarakat adat → konflik.
4. Pembagian areal HPH terpecah-pecah dalam skala kecil pada pulau yang berbeda → tumpang tindih dengan fungsi hutan lainnya, tidak ada kelestarian.
5. ketimpangan antara kebutuhan kayu oleh industry dan masyarakat dengan kemampuan hutan produksi lestari → penebangan hutan oleh HPH tanpa aturan dan penebangan ilegal.
6. kebijakan pemerintah untuk IPK : tujuan non-kehutanan dan hutan tanaman industry → Deforestasi.
7. Fungsi perencanaan, pelaksana-an, dan pengawasan oleh pemerintah tidak terlaksana dengan baik.
8. Perundangan dan peraturan pelaksanaan di bidang kehutanan dan bidang lain yang terkait saling tumpang tindih dan tidak konsisten.
9. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kehutanan, dan tuntutan masyarakat.

III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR

Lanskap pada pulau-pulau kecil dapat diidentifikasi atau ditetapkan sebagai “Multi Laskape” pulau-pulau kecil yang terdiri dari: (a) gugus pulau; (b) laut pulau; (c) Pulau; (d) Daerah Aliran Sungai (DAS); (e) sistem lahan, penutupan lahan, bentang alam, keragaman hayati, Tata Guna Hutan/Tata Guna Lahan, potensi sumber daya Alam (SDA), dan perkembangan ekologi, ekonomi dan social politik yang terjadi pada wilayah tersebut.



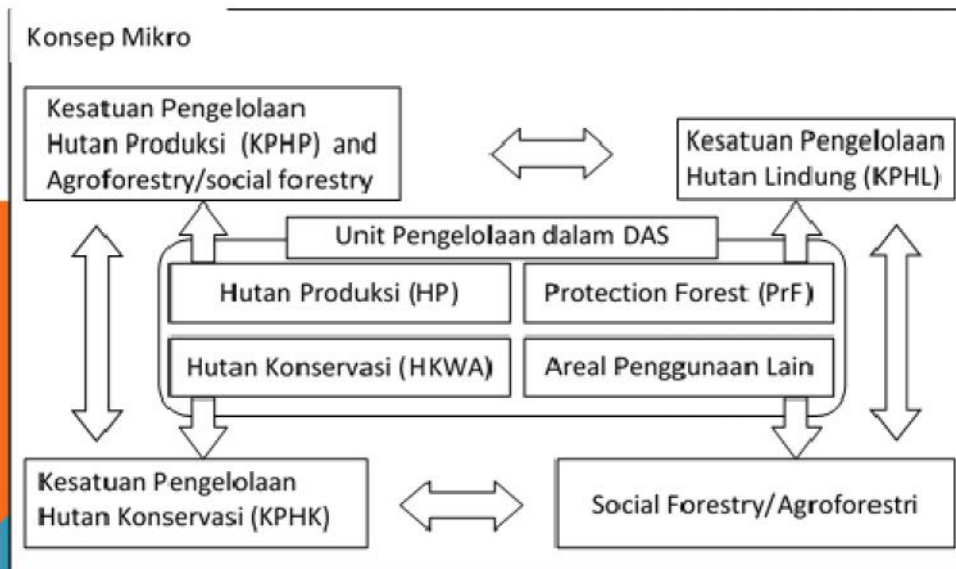
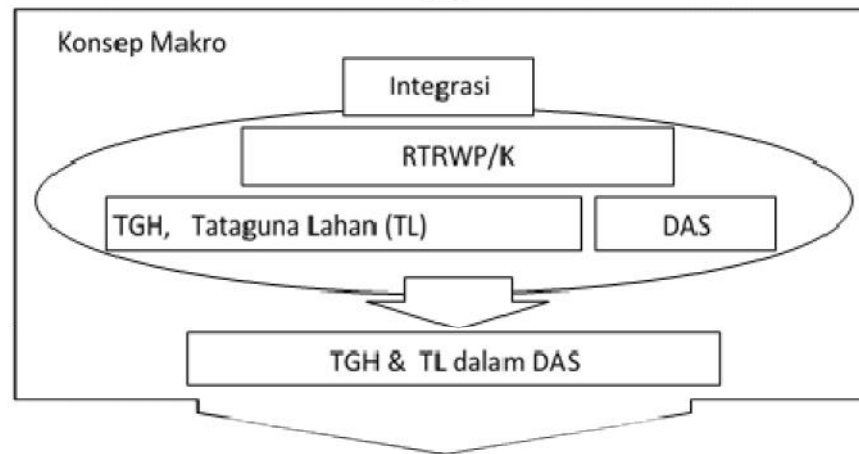
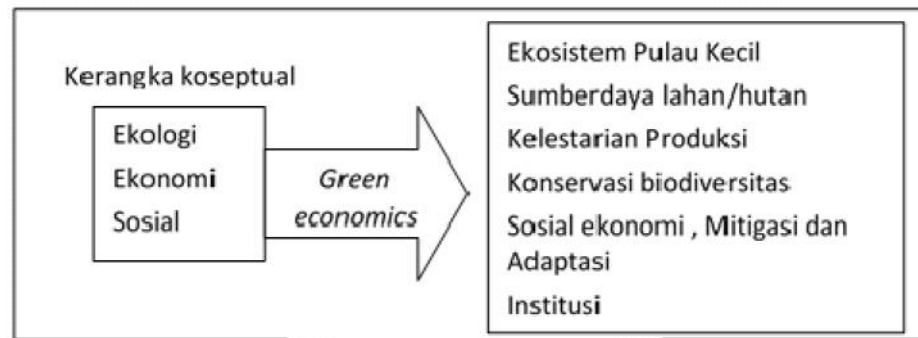
III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR.....

Penjabaran “Multi Lanskap” pada ekoregion Maluku yang terdiri dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara dapat dijelaskan pada masing-masing provinsi yaitu:

(1) Provinsi Maluku terdiri dari, (a) 12 gugus pulau, (b) 1340 pulau; (c) pesisir dan laut dengan panjang pantai 10.662 Km, terdapat mangrove, padang lamun, terumbu karang; (d) DAS sempit dan pendek, lebih dari 1340 DAS, (e) luas tataguna hutan (TGH)/Taguna Lahan seluas 5.418.500 Ha dengan seluruh kondisi biofisik dan social ekonomi dan perkembangan politik. (2) Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari: (a) 8 gugus pulau, (b) 805 pulau; (c) pesisir dan laut dengan panjang pantai 6.644 Km, terdapat mangrove, padang lamun, terumbu karang; (d) DAS sempit dan pendek lebih dari 805 DAS, (e) luas tataguna hutan (TGH)/Taguna Lahan seluas 3.327.800 Ha dengan seluruh kondisi biofisik dan social ekonomi dan perkembangan politik



Rentan terhadap kerusakan lingkungan
Pemanasan dan perubahan iklim global



III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR.....

Diagram Analisis Multi Lanskap Pulau-Pulau Kecil

Konsep pengelolaan multi lanskap Pulau-Pulau Kecil yang lestari/berkelanjutan, yang berbasis pada konsep ekonomi hijau (Kastanya, 2002; 2010; 2016)

III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR...

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu melakukan pembaharuan konsep ekonomi konvensional yang mengejar pertumbuhan dan bersifat eksploitatif menuju ekonomi hijau (green economy) yang dibangun atas dasar keseimbangan antara teori ekologi, ekonomi dan sosial untuk mendukung pembangunan lestari atau berkelanjutan dengan indikator dan sasaran yang harus dicapai yaitu: (1) reduksi emisi; (2) cadangan karbon meningkat; (3) keragaman hayati dan jasa lingkungan terpelihara; (4) pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Konsep Makro

Mengintegrasikan seluruh rencana pembangunan sektoral dalam pembangunan wilayah. Khusus untuk sector penggunaan lahan yaitu sektor kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan, sedangkan rencana pembangunan wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten (RTRWP/K, berbasis gugus pulau dan laut pulau) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) pulau-pulau kecil.

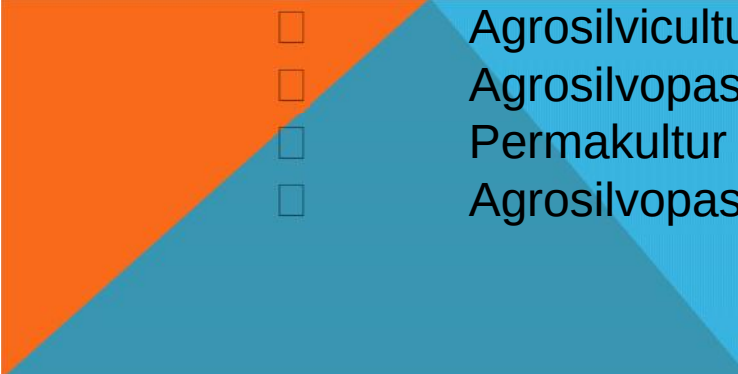
III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR...

Kerangka Konsep Mikro

Kerangka Konsep Mikro Seluruh rencana sektoral yang telah terintegrasi dalam DAS dan RTRWP/K yang dirancang dalam Unit pengelolaan terkecil yang dikelola secara terintegrasi dan lestari/berkelanjutan, sehingga dapat mencapai kelestarian DAS dan Kelestarian Gugus Pulau dan Laut Pulau yang berarti dapat mencapai kelestarian seluruh kawasan pulau-pulau kecil di Maluku.

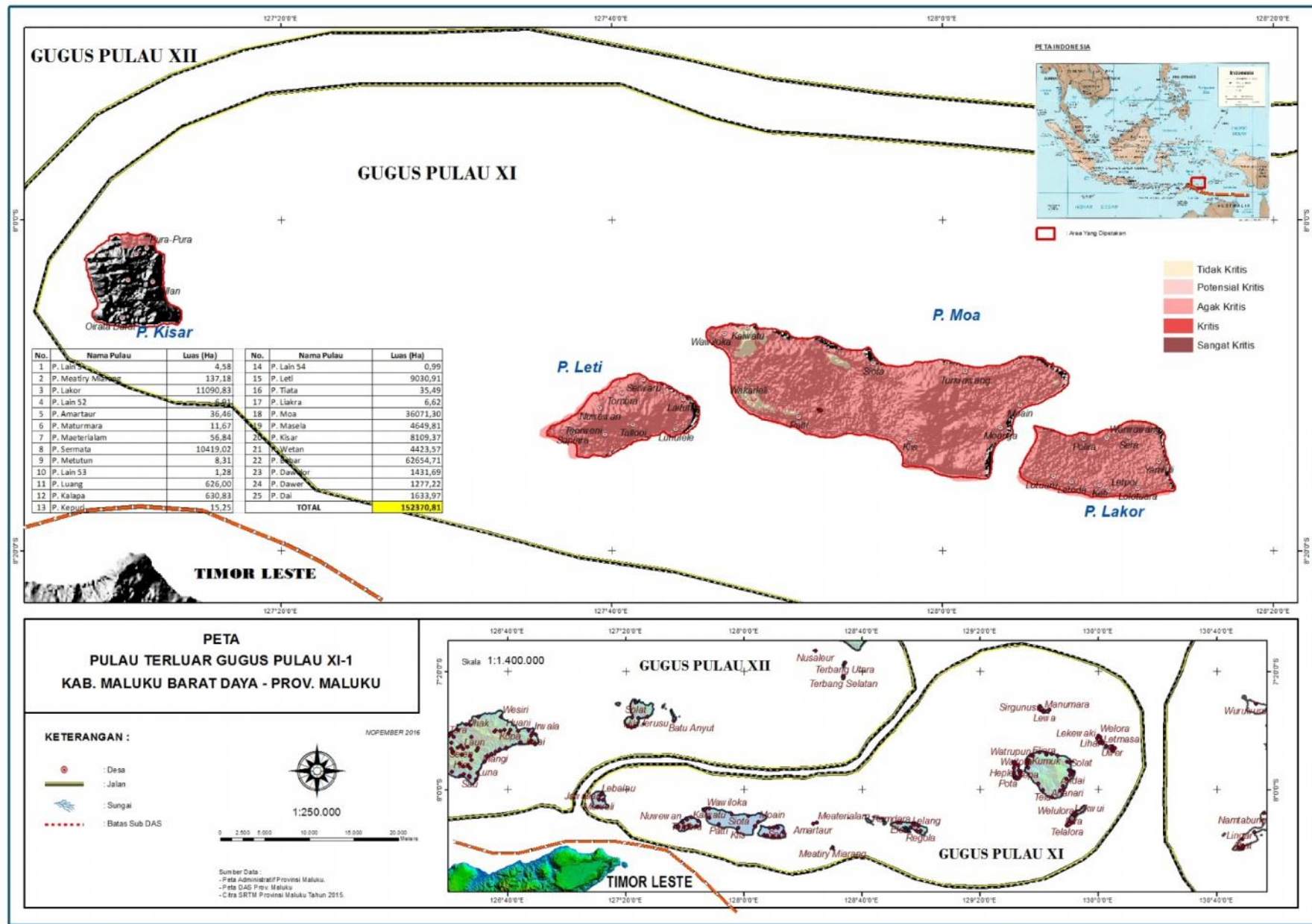
Unit Pengelolaan Terkecil

- 1.1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP/social forestry)
- 1.2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL/social forestry)
- 1.3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK/social forestry)
- 1.4. Kesatuan Pengelolaan Agroforestry (KPA) terdiri dari:

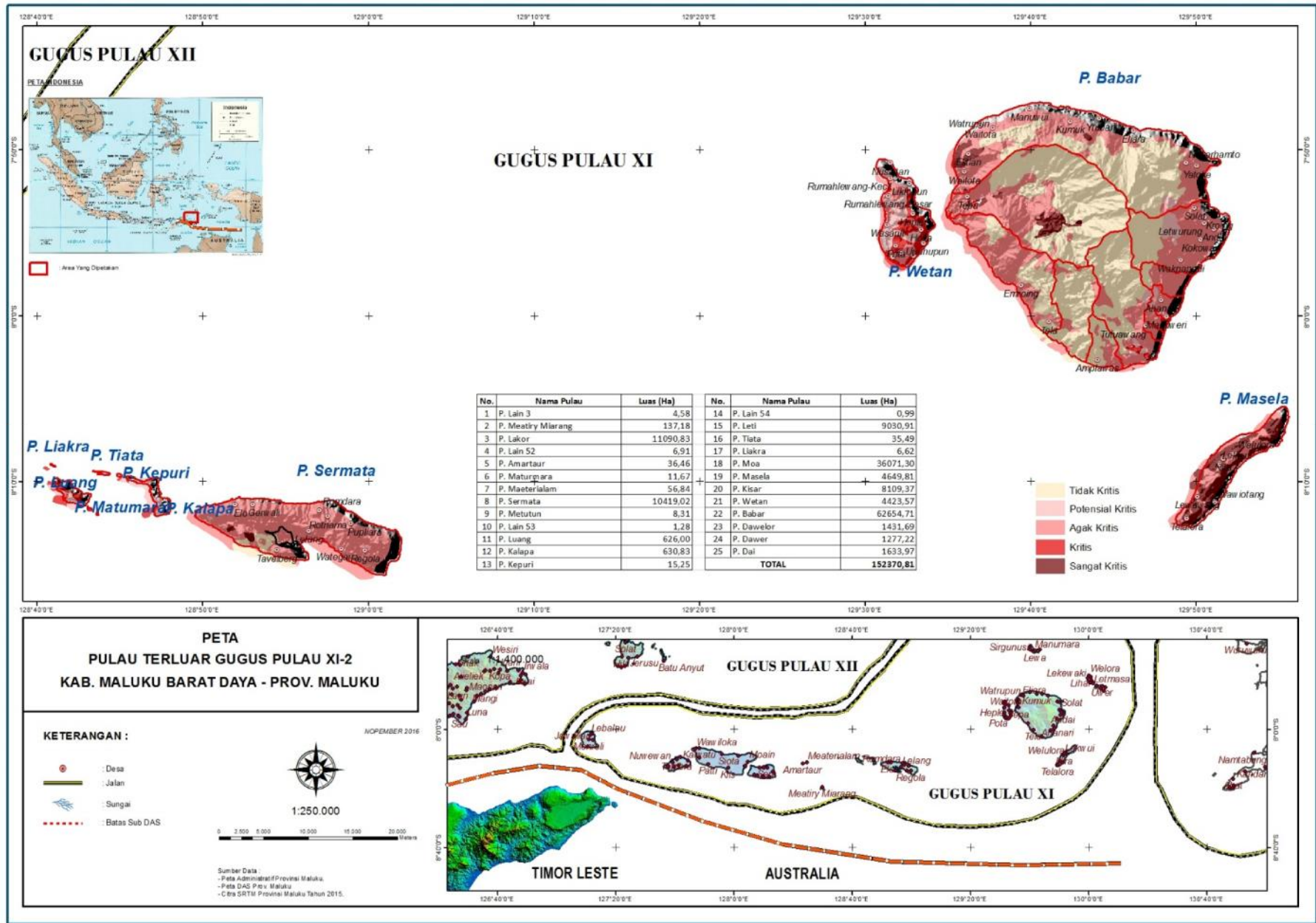
- 
- ☐ Agrosilviculture
 - ☐ Agrosilvopasture
 - ☐ Permakultur
 - ☐ Agrosilvopasturefisheries (danau, sungai dan pesisir)

Pengelolaan kawasan terluar seharusnya sesuai dengan konsep multi lanskap hanya prioritasnya harus difokuskan pada wilayah terluar. Di provinsi Maluku, pulau-pulau terluar yang berhadapan dengan batas Negara lain yaitu pulau-pulau yang tergabung dalam gugus pulau dan ada 3 gugus yang berbatasan dengan Negara lain yaitu gugus X berbatasan dengan Australia , gugus XI berbatasan dengan Timor Leste. dan gugus XII dengan Timor Leste

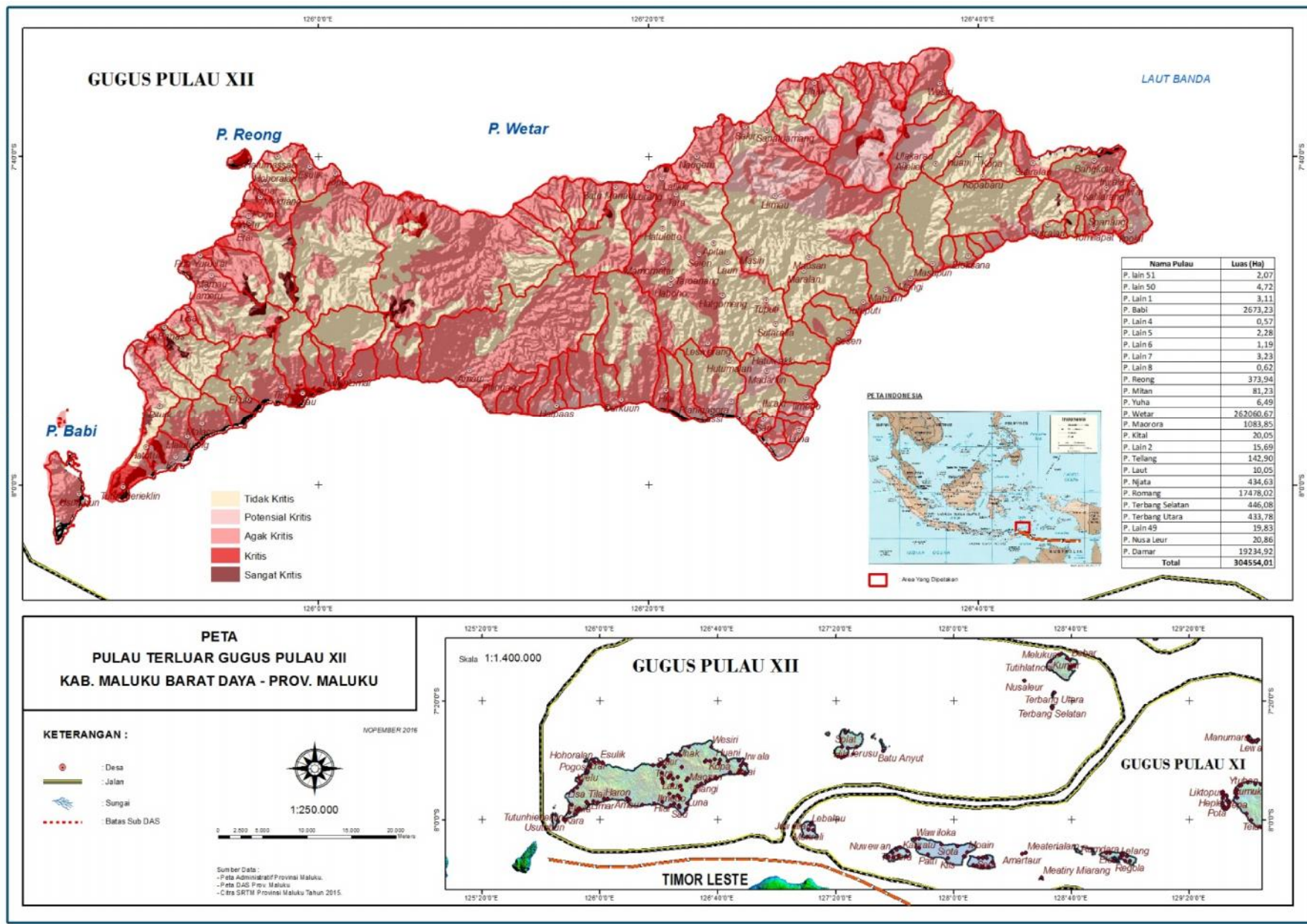
III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR.....



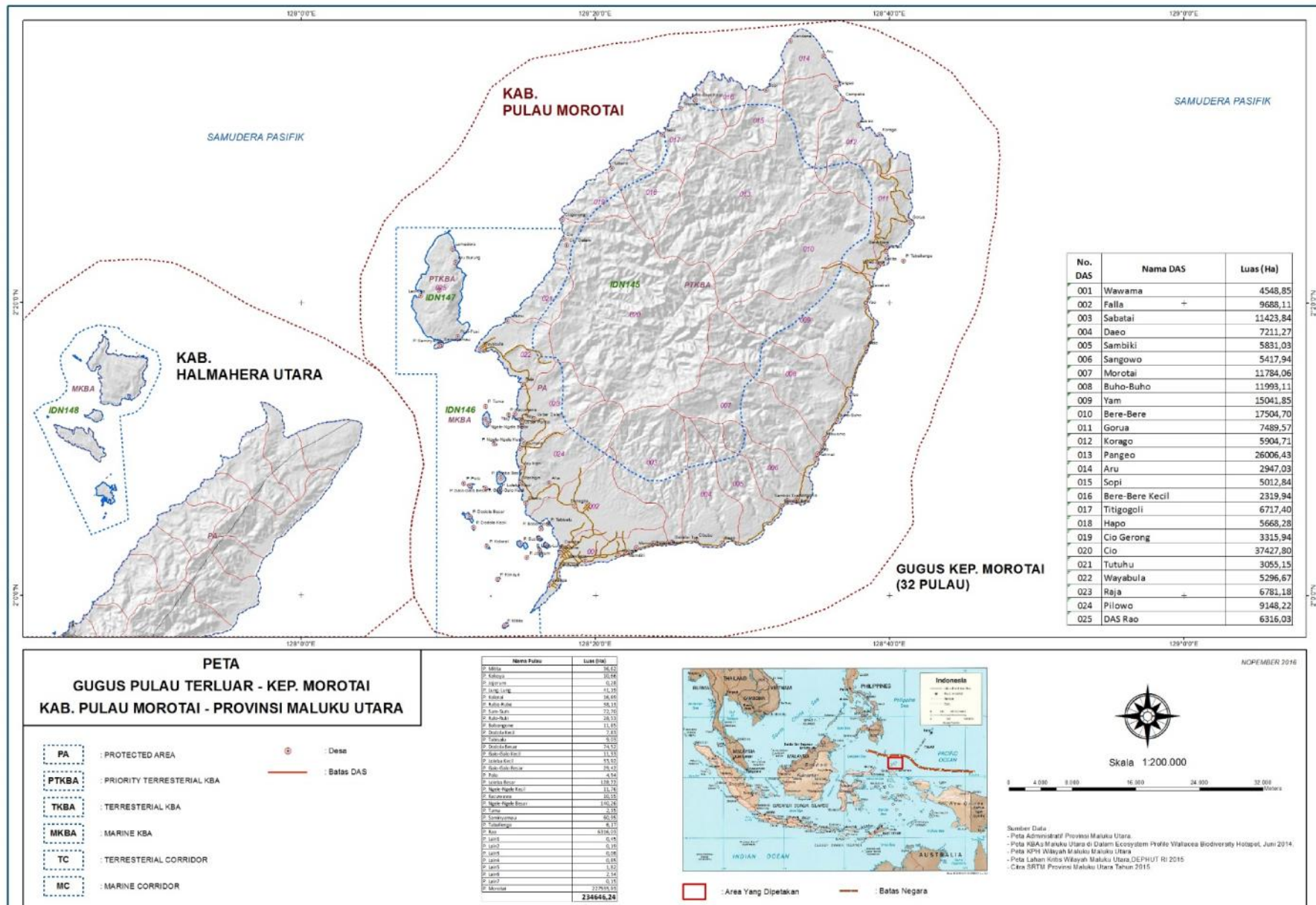
III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR.....



III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR.....



III. KONSEP PENGELOLAAN LANSKAP PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR.....



IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU

Penerapan konsep pengelolaan multi lanskap seperti dijelaskan pada bagian III di atas, yang dikembangkan dalam kerangka konseptual, konsep makro dan konsep mikro. Maka ekorigion Maluku harus mengalami perubahan kebijakan dari ekonomi yang bersifat eksploitatif menuju ekonomi hijau. Karena itu didalam konsep makro dengan mengintegrasikan lanskap gugus pulau, DAS dan sstem lahan atau rencana tata guna hutan (TGH : HP,HPT, HPK, HL, HSA-W dan APL) atau tata guna lahan pertanian dengan semua potensi dan biodiversitasnya telah terdistribusi dalam DAS dan gugus pulau. Landskap pada tingkat Konsep Makro merupakan arahan pembangunan wilayah bagi semua sektor pembangunan untuk melakukan perencanaan sektornya secara terintegrasi dengan memperhatikan seluruh lanskap dan potensi SDA dan biodiversitas untuk mencapai kelestarian dan kesejahteraan masyarakat

IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU....

Pengelolaan lanskap hutan dikembangkan unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yng terdiri dari KPHK, KPHL dan KPHP. Khusus untuk KPHP dan KPHL yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dari hasil rancang bangun untuk provinsi Maluku terdapat 22 unit KPH (5 unit KPHL dan 17 unit KPHP).

Hasil identifikasi dan deliniasi KPH pada ekoregion Maluku

IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU....

NO.	UNIT	FUNGSI KAWASAN			LUAS (HA)	JENIS KPH
		HL (HA)	HPT (HA)	HP (HA)		
1	UNIT V	± 54.896	± 36.632	± 7.100	± 98.628	KPHL
2	UNIT IX	± 63.025	± 22.561	± 0	± 85.586	KPHL
3	UNIT XIII	± 30.469	± 0	± 0	± 30.469	KPHL
4	UNIT XIV	± 10.964	± 0	± 0	± 10.964	KPHL
5	UNIT XV	± 13.646	± 0	± 0	± 13.646	KPHL
JUMLAH KPHL		± 173.000	± 59.193	± 7.100	± 239.293	
6	UNIT I	± 52.262	± 45.949	± 44.362	± 142.573	KPHP
7	UNIT II	± 73.478	± 96.033	± 62.921	± 232.432	KPHP
8	UNIT III	± 51.162	± 69.360	± 94.998	± 215.520	KPHP
9	UNIT IV	± 59.261	± 81.022	± 3.552	± 143.835	KPHP
10	UNIT VI	± 32.628	± 99.032	± 0	± 131.660	KPHP
11	UNIT VII	± 4.545	± 34.609	± 27.903	± 67.057	KPHP
12	UNIT VIII	± 18.422	± 78.177	± 5.627	± 102.226	KPHP
13	UNIT X	± 3.607	± 49.957	± 12.759	± 66.323	KPHP
14	UNIT XI	± 38.896	± 98.025	± 5.072	± 141.993	KPHP
15	UNIT XII	± 50.689	± 129.056	± 29.076	± 208.821	KPHP
16	UNIT XVI	± 5.824	± 2.986	± 3.802	± 12.612	KPHP
17	UNIT XVII	± 2.019	± 26.791	± 42.517	± 71.327	KPHP
18	UNIT XVIII	± 10.168	± 51.420	± 72.595	± 134.183	KPHP
19	UNIT XIX	± 9.253	± 9.657	± 28.849	± 47.759	KPHP
20	UNIT XX	± 23.093	± 0	± 48.681	± 71.774	KPHP
21	UNIT XXI	± 3.042	± 0	± 57.948	± 60.990	KPHP
22	UNIT XXII	± 2.624	± 0	± 114.862	± 117.486	KPHP
JUMLAH KPHP		± 440.973	± 872.074	± 655.524	± 1.968.571	
JUMLAH KPHL DAN KPHP		± 613.973	± 931.267	± 662.624	± 2.207.864	

Keterangan : Luas unit KPHL dan KPHP dihitung secara digital

Sumber : Direktorat
Wilayah Pengelolaan dan
Penyiapan Areal
Pemanfaatan Kawasan
Hutan(Ditjen
Planologi
Kehutanan), 2010

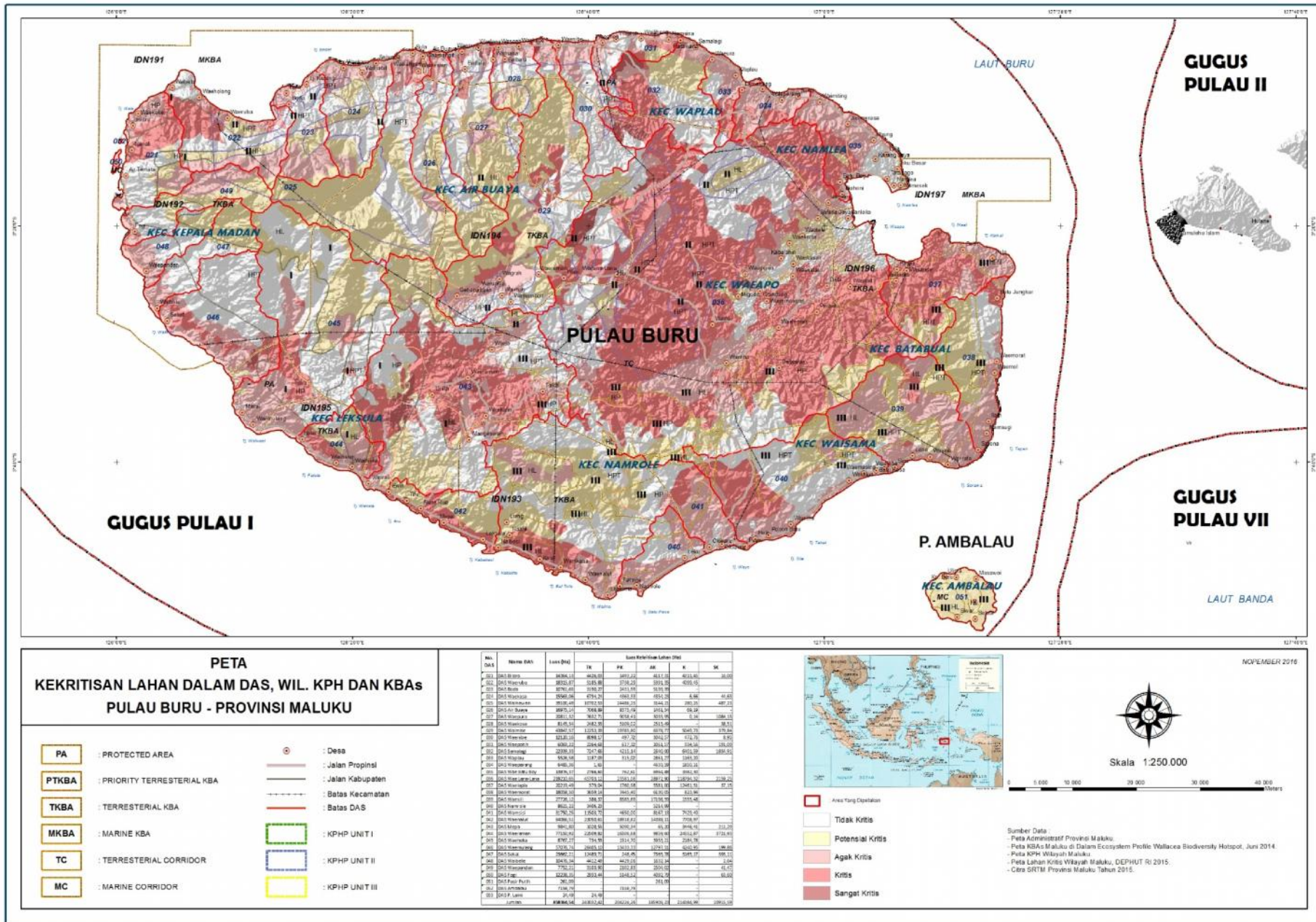
Hasil identifikasi dan deliniasi KPH pada ekoregion Maluku

IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU....

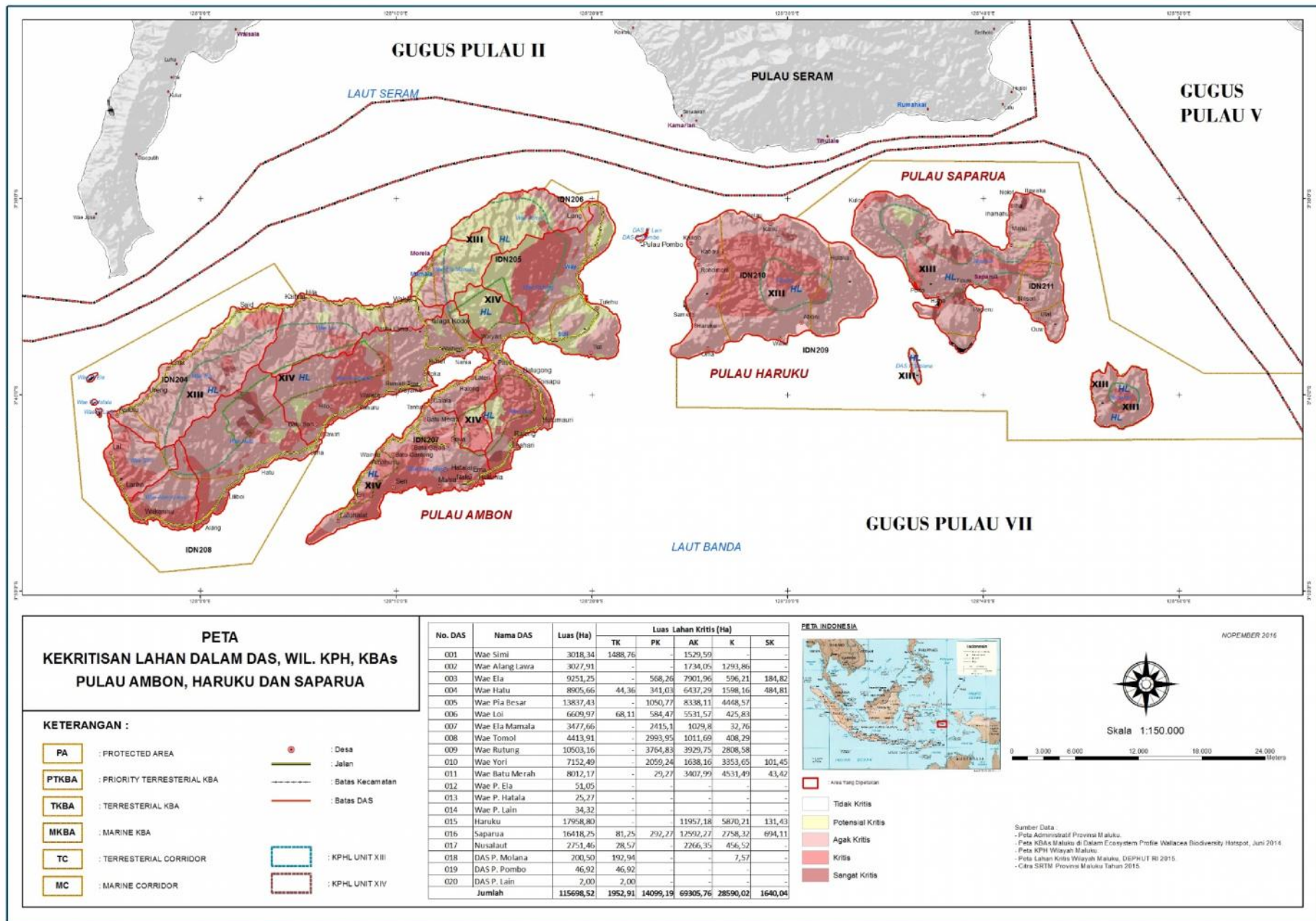
No.	NAMA UNIT	FUNGSI KAWASAN HUTAN			LUAS (Ha)	JENIS KPH
		HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)		
1	UNIT I	± 98.149	± 57.157	± 0	± 155.306	KPHL
2	UNIT II	± 60.003	± 40.081	± 6.160	± 106.244	KPHL
3	UNIT III	± 91.479	± 61.710	± 23.474	± 176.663	KPHL
4	UNIT VI	± 38.698	± 14.312	± 18.266	± 71.276	KPHL
5	UNIT XI	± 9.705	± 0	± 0	± 9.705	KPHL
Jumlah KPHL		± 298.034	± 173.260	± 47.900	± 519.194	
6	UNIT IV	± 44.204	± 88.906	± 68.734	± 201.844	KPHP
7	UNIT V	± 25.396	± 49.770	± 6.204	± 81.370	KPHP
8	UNIT VII	± 23.174	± 57.914	± 14.792	± 95.880	KPHP
9	UNIT VIII	± 8.606	± 28.663	± 0	± 37.269	KPHP
10	UNIT IX	± 0	± 16.325	± 0	± 16.325	KPHP
11	UNIT X	± 21.056	± 13.917	± 9.604	± 44.577	KPHP
12	UNIT XII	± 51.226	± 45.825	± 78.620	± 175.671	KPHP
13	UNIT XIII	± 53.424	± 73.024	± 8.278	± 134.726	KPHP
14	UNIT XIV	± 11.990	± 67.004	± 94.624	± 173.618	KPHP
15	UNIT XV	± 24.213	± 34.420	± 36.989	± 95.622	KPHP
16	UNIT XVI	± 21.061	± 4.473	± 166.794	± 192.328	KPHP
Jumlah KPHP		± 284.350	± 480.241	± 484.639	± 1.249.230	
Jumlah KPHL dan KPHP		± 582.384	± 653.501	± 532.539	± 1.768.424	

*Sumber : Direktorat
Wilayah Pengelolaan
dan Penyiapan Areal
Pemanfaatan
Kawasan
Hutan(Ditjen
Planologi
Kehutanan), 2010*

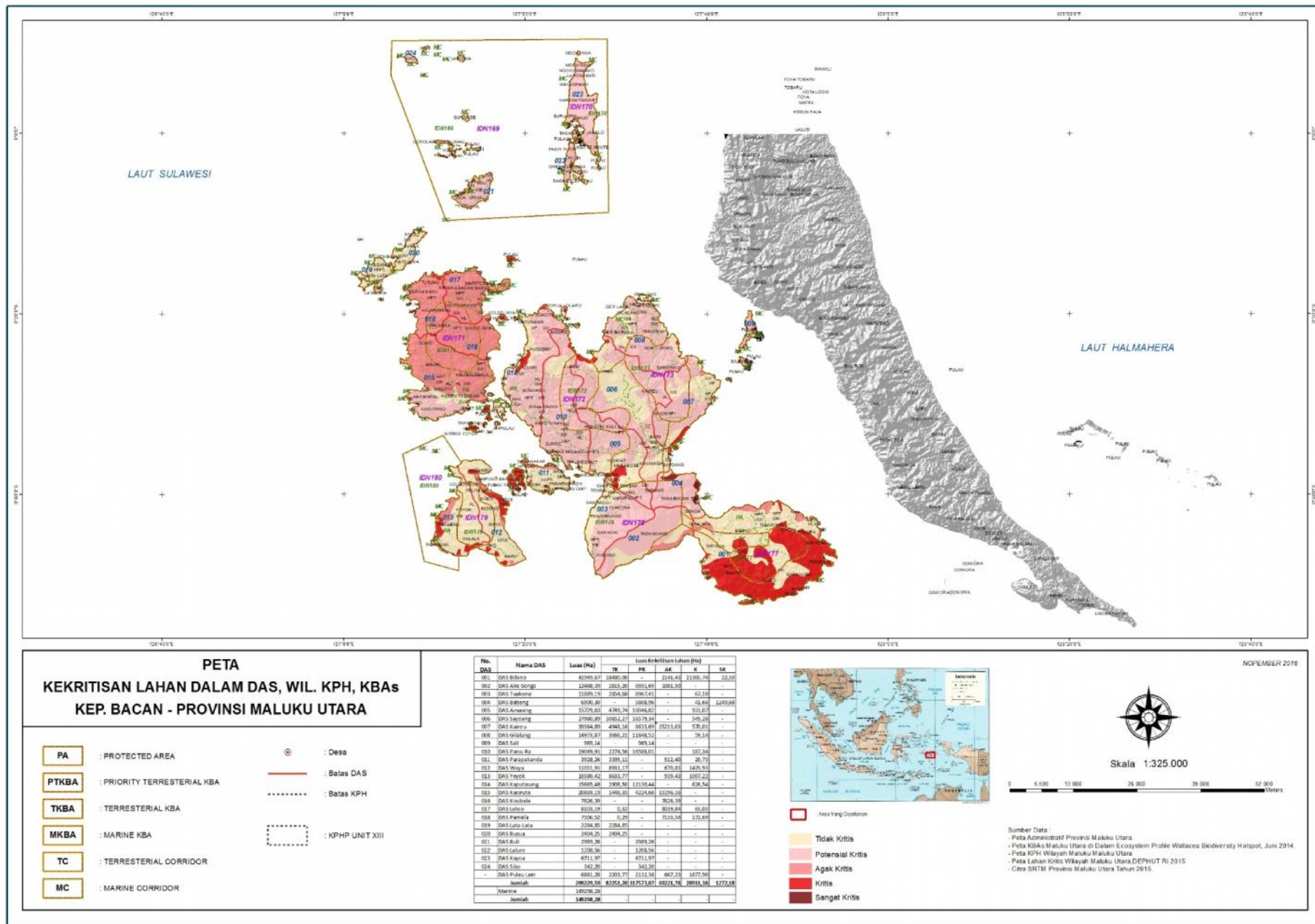
IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU.....



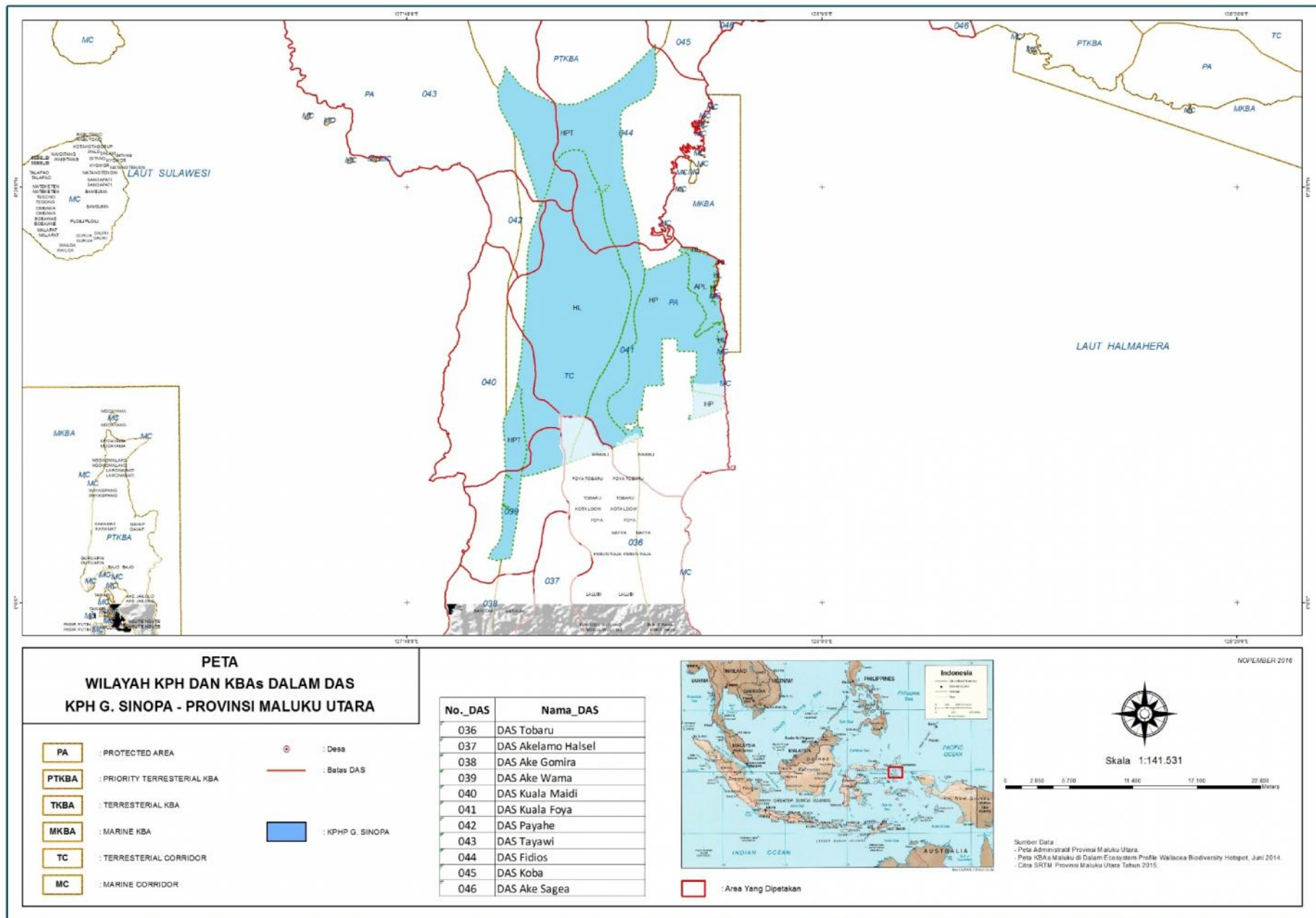
IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU.....



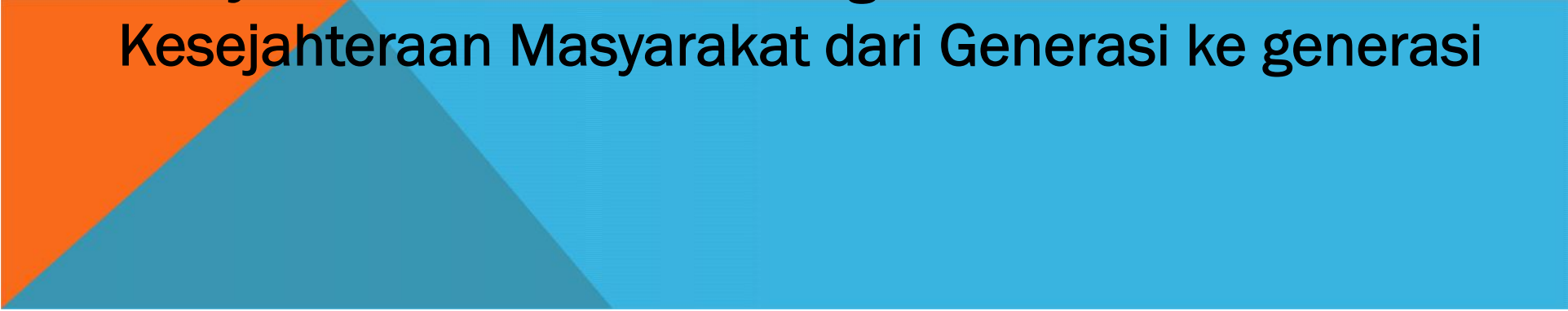
IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU.....



IV. KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN MALUKU.....

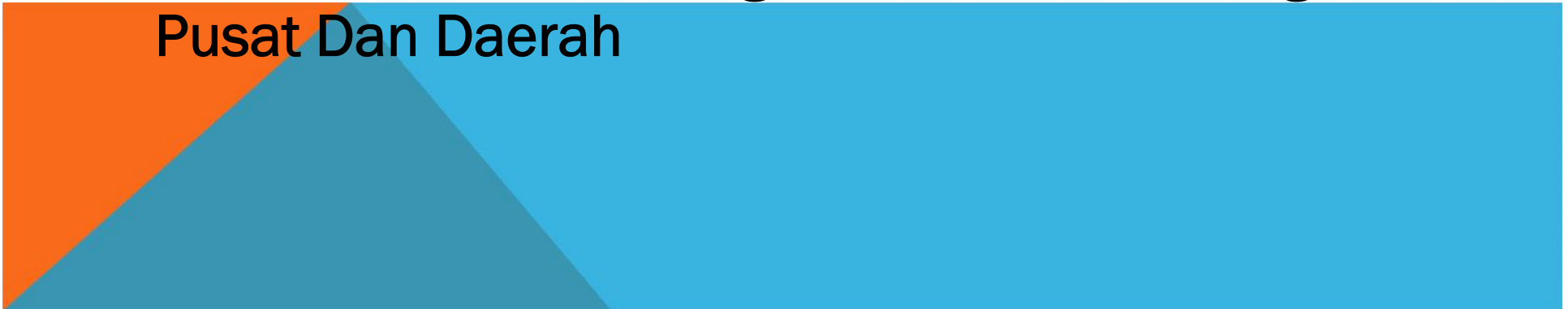


V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

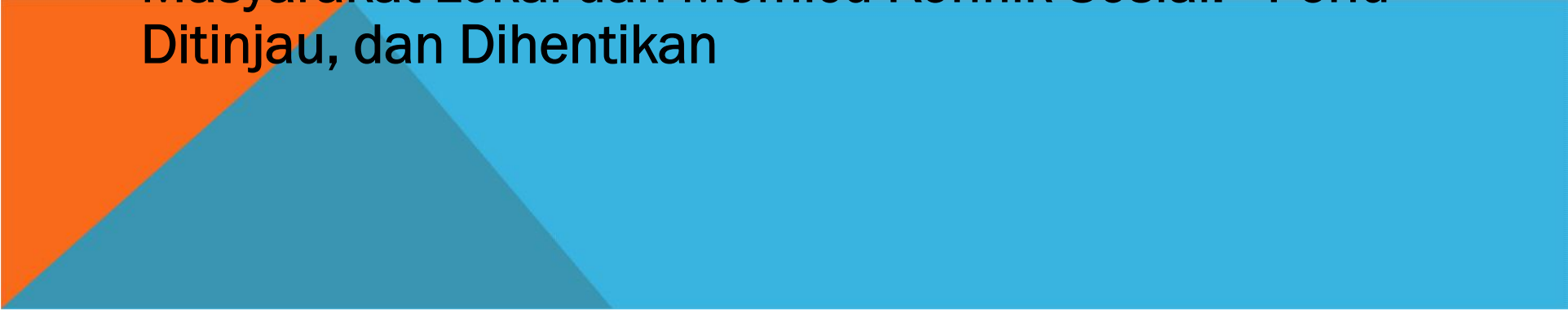
1. Peralihan sistem Ekonomi dari Ekonomi Eksploitatif ke Ekonomi Hijau Mutlak/Harus Dilakukan. Diperlukan Peninjauan Seluruh Regulasi dan Menetapkan Regulasi untuk Menjamin Terlaksananya “Sistem Ekonomi Hijau”
 2. Pengelolaan Lanskap sebagai Kerangka Pelaksanaan Ekonomi Hijau Menjadi Basis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sub Nasional untuk Menjamin Kelestarian Ekoregion di Indonesia dan Kesejahteraan Masyarakat dari Generasi ke generasi
- 

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3. Pengelolaan Multi Lanskap Pulau-Puau Kecil Menuju pada Pengelolaan Lanskap Terpadu untuk Menjamin Kelestarian Lingkungan, Ketersediaan Air Bersih, Energi Terbarukan, Kebutuhan Pangan, Jasa Lingkungan, Ekowisata, Keutuhan Sosial dan Budaya, Resolusi Konflik, Pencegahan Peningkatan Emisi, dan Tetap Menjamin Pertumbuhan Ekonomi
4. Pengelolaan KPH di Tingkat Tapak sebagai Unit Lanskap Harus diberi Kewenangan yang Cukup Sehingga Dapat tercapai KPH Mandiri. Diperlukan Pembenahan Kelembagaan, SDM dan Sinergisitas Pusat Dan Daerah



V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5. Perlu Pengkajian Khusus untuk Pembentukan KPH Adat Pada Pulau-Pulau Kecil dan Pada Wilayah-Wilayah Berbasis Adat untuk Menjamin Resolusi konflik Tenurial, Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat
 6. Wilayah Pulau-Pulau Kecil dan Terluar dengan Tingkat Kerentanan Yang Tinggi Perlu diberi Otonomi Khusus pada Aspek Kewenangan Maupun Pembiayaan Pembangunan
 7. Pertambangan Pada Pulau Pulau Kecil Terbukti Telah Merusak Seluruh Sistem ekologi dan Sosial Budaya Masyarakat Lokal dan Memicu Konflik Sosial. Perlu Ditinjau, dan Dihentikan
- 

TERIMA KASIH

